

**ANALISIS PREFERENSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
MAGELANG**

*Analysis of the Preference of Assembly at Region Members in Education Policy
at Magelang District*

**Budi Haryanto
Kusmintardjo
Ahmad Yusuf Sobri**

e-mail: haryantobudi15@gmail.com

**Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang Nomor 5 Malang**

Abstrak: Tujuan penelitian ini menjelaskan tingkat kecenderungan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), faktor-faktor perumusan kebijakan, dan kepedulian DPRD dalam kebijakan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif persentase, dengan 16 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan kebijakan pendidikan cenderung kepada fungsi anggaran. Pertimbangan yang digunakan merumuskan kebijakan pendidikan melalui faktor eksternal, yaitu partai politik, kelembagaan dan aspirasi masyarakat. Tingkat kepedulian terhadap meningkatkan mutu pendidikan adalah tergolong tinggi.

Kata kunci: preferensi, tugas DPRD, kebijakan pendidikan

Abstract: The purpose of this study is to explain the level of the role of the House of Representatives (DPRD), the factors of policy formulation, and the concern of DPRD in the education policy. This study used quantitative descriptive percentage approach, with 16 respondents. Data collection techniques used questionnaires. The results showed that in running the education policy tend to the budget function. The considerations used formulate education policy through external factors, namely political parties, institutions and community aspirations. The level of concern for improving the quality of education is high.

Keywords: preference, parliament task, education policy

Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan mampu membentuk kepribadian, moral dan kemampuan anak didik menjadi lebih baik. Terutama bagi pemerintah, pendidikan harus mendapatkan prioritas utama dalam hal pemerataannya yang disertai dengan peningkatan mutu pendidikan. Upaya untuk mengembangkan potensi warga negara agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta kehidupan sosial yang sehat. Setiap warga negara harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang layak. Jangan sampai pendidikan hanya

dinikmati secara terbatas oleh kalangan ekonomi menengah ke atas. Pemerintah juga harus lebih serius mencanangkan pendidikan, karena warga negara merupakan generasi penerus bangsa.

Salah satu solusi mengatasi masalah dalam pendidikan yaitu dengan pembuatan kebijakan pendidikan. Nugroho (dalam Rusyanti, 2013) menerangkan “kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan”. Sedangkan menurut Slamet (dalam Rohman & Wiyono, 2010:164) “kebijakan pendidikan adalah apa yang dikatakan (diputuskan) dan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan”. Dengan demikian kebijakan pendidikan berisi keputusan dan tindakan yang mengalokasikan penilaian.

Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal karena dibuat oleh orang yang memiliki otoritas dan legitimasi dalam sistem pemerintahan. Menurut Bakry (2010:2), keputusan kebijakan publik bersifat mengikat bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak dalam menyiapkan rancangan perundang-undangan dan peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kecenderungan peran anggota DPRD dalam menempatkan kebijakan pendidikan, mengetahui pertimbangan yang digunakan anggota DPRD dalam merumuskan kebijakan, mengetahui kepedulian anggota DPRD dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Magelang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan penelitian deskriptif persentase. Penelitian ini terdapat tiga variabel yang terdiri dari peran dan fungsi anggota DPRD, faktor yang di pertimbangkan anggota DPRD dalam merumuskan kebijakan, dan kepedulian anggota DPRD dalam kebijakan pendidikan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Magelang yaitu 16 pejabat yang terdiri dari 4 sebagai pimpinan dan 12 sebagai anggota Komisi IV yang menangani bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan sampel dari semua populasi yang berjumlah 16 orang dengan

menggunakan teknik total sampling yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel (Sugiono, 2005:96).

Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa kuesioner jenis tertutup karena telah disediakan jawaban sehingga responden hanya memilih salah satu alternatif jawaban. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala *Likers* 4 (empat) poin untuk mengurangi jawaban netral. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui preferensi, faktor perumus kebijakan, dan kepedulian DPRD dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penilaian pengamatan yang dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkat sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah.

HASIL

Preferensi Anggota DPRD

Tabel 1 Hasil Uji K.S (*Kolmogorof-Smirnov*)

Peran DPRD	Tingkat Kecenderungan			
	X		Y	
	Pengawasan (X ₃)	Anggaran (X ₂)	Legislasi (X ₁)	Kebijakan Pendidikan
Rata-rata skor	26	27	103	127
K.S	0,187	0,311	0,187	0

Dapat diketahui peranan anggota DPRD Kabupaten Magelang sebagai fungsi anggaran adalah tugas pertama dengan nilai 0,311. Sedangkan fungsi pengawasan dan legislasi adalah tugas kedua dengan nilai 0,187. Jadi, fungsi anggaran dalam anggota DPRD memiliki peran yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Magelang melalui kebijakan yang telah dibuat.

Faktor Perumusan Kebijakan

Tabel 2 Faktor Dominan dalam Perumusan Kebijakan

Faktor	Skor	Rata-rata
Internal Individu	200	3,13
Eksternal Individu	505	3,16

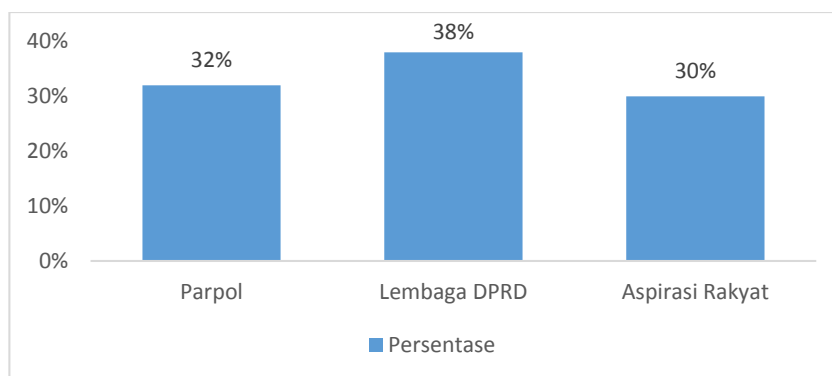
Berdasarkan Tabel 2 tentang faktor dominan dalam perumusan kebijakan, dapat diketahui bahwa faktor eksternal individu dengan nilai rata-rata 3,16

dibandingkan faktor internal individu dengan nilai mean 3,13. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal individu lebih berpengaruh dibandingkan faktor internal individu.

Tabel 3 Deskripsi Faktor Eksternal dalam Perumusan Kebijakan

Faktor Eksternal	Jumlah	Rata-rata	Persentase
Parpol	194	3,03	32%
Lembaga DPRD	172	3,58	38%
Aspirasi Rakyat	139	2,90	30%
Total			100%

Menurut Tabel 3 tentang deskripsi faktor eksternal dalam perumusan kebijakan dapat diketahui bahwa faktor parpol memiliki persentase 32%, faktor lembaga DPRD memiliki persentase 38%, dan faktor aspirasi rakyat memiliki persentase 30%. Jadi faktor eksternal yang sangat berpengaruh bagi anggota DPRD dalam perumusan kebijakan adalah faktor eksternal dari lembaga DPRD. Hal ini digambarkan dalam grafik Gambar 1.



Gambar 1 Persentase Faktor Pertimbangan Perumusan Kebijakan

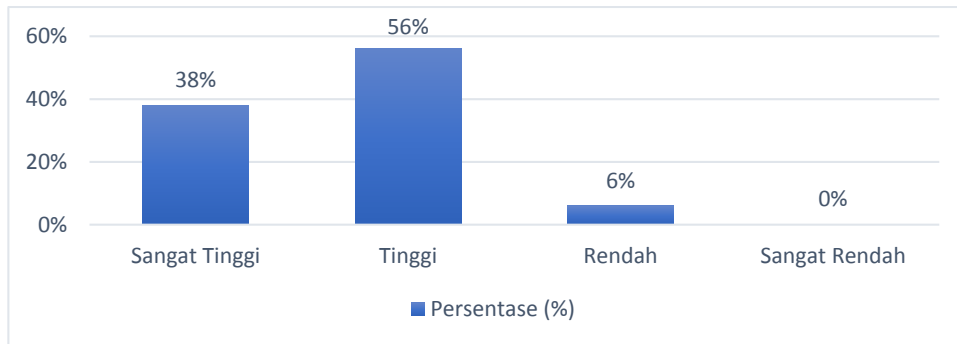
Kepedulian Meningkatkan Mutu Pendidikan

Tabel 4 Deskripsi Kualifikasi Kepedulian Meningkatkan Mutu Pendidikan

Kualifikasi	Rentang Skor	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	70-84	6	38%
Tinggi	53-69	9	56%
Rendah	37-52	1	6%
Sangat Rendah	21-36	0	0%

Dapat diketahui kepedulian meningkatkan mutu pendidikan dapat diketahui bahwa 6 responden (38%) menunjukkan kepedulian kebijakan pendidikan kategori

sangat tinggi, sebanyak 9 responden (56%) menunjukkan kualifikasi tinggi, sebanyak 1 responden (6%) menunjukkan kualifikasi rendah, dan 0 responden (0%) menunjukkan kualifikasi sangat rendah. Grafik persentase kepedulian meningkatkan mutu pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Kepedulian Meningkatkan Mutu Pendidikan.

PEMBAHASAN

Preferensi Anggota DPRD dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Magelang

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa anggota DPRD memiliki preferensi dalam menjalankan tugasnya terkait kebijakan pendidikan di Kabupaten Magelang. Hal ini berarti tugas sebagai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dijalankan secara bersamaan atau seimbang. Fungsi anggaran sebagai tugas urutan pertama sedangkan legislasi dan pengawasan urutan kedua. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kartiwa (2006:11), bahwa “dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat, anggota DPRD melakukan tiga fungsi utama, yaitu: 1) fungsi legislasi, 2) fungsi anggaran, 3) fungsi pengawasan”. Dapat diketahui, bahwa DPRD Kabupaten Magelang berusaha menjalankan secara seimbang dalam mengemban tugasnya untuk menyejahterakan rakyat Kabupaten Magelang. Salah satunya melalui kebijakan pendidikan.

Pertimbangan Anggota DPRD dalam Merumuskan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan anggota DPRD dalam perumusan kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Tergolong tinggi dengan rata-rata 3,16 dibanding dengan faktor

internal sebesar 3,13. Jadi dapat disimpulkan, bahwa anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam proses perumusan kebijakan terdapat pengaruh tinggi dari faktor eksternal yaitu: partai politik, kelembagaan dan aspirasi masyarakat. Partai Politik dikarenakan anggota DPRD berasal dari salah satu partai politik. Kelembagaan dikarenakan anggota DPRD mempunyai keterikatan kerja dan komitmen bersama. Aspirasi dari masyarakat dikarenakan anggota DPRD memiliki kewajiban menerima, mengelola dan menjalankan aspirasi dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dunn (dalam Subarsono, 2006:8) yang mengungkapkan, “serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis”.

Faktor eksternal tersebut yang paling berpengaruh adalah faktor dari lembaga DPRD dengan persentase 38%. Anggota DPRD dalam bidang pendidikan telah menghasilkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013 yang merupakan hasil upaya perbaikan dalam tatanan konsep pendidikan, perundang-undangan, peraturan dan pelaksanaan pendidikan serta menghilangkan praktik-praktik pendidikan dimasa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik sehingga segala aspek pendidikan di masa mendatang menjadi lebih baik.

Kepedulian Anggota DPRD dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan secara simultan ada kepedulian anggota DPRD dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Magelang. Kepedulian tergolong tinggi dengan persentase 56%, sangat tinggi 38% dan tergolong rendah 6%. Jadi dapat disimpulkan, bahwa tingkat kepedulian anggota DPRD Kabupaten Magelang terhadap meningkatkan mutu pendidikan adalah tergolong tinggi.

Kepedulian anggota DPRD dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Magelang, meliputi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendidikan berbasis keunggulan lokal, akreditasi pendidikan, menerapkan standar pelayanan minimal, bantuan biaya pendidikan PAUD hingga pendidikan menengah, menerapkan sekolah gratis. Sesuai dengan Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) anggota DPRD Kabupaten Magelang di dalam kebijakan pendidikan cenderung kepada fungsi anggaran dengan nilai tingkat kecenderungan 0,311, sedangkan fungsi legislasi dan pengawasan hanya memiliki nilai tingkat kecenderungan 0,187; (2) pertimbangan yang digunakan anggota DPRD dalam merumuskan kebijakan pendidikan di Kabupaten Magelang adalah melalui faktor eksternal, yaitu: partai politik, kelembagaan dan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini faktor eksternal yang sangat berpengaruh yaitu faktor dari lembaga DPRD dengan persentase 38%. Kelembagaan DPRD dikarenakan anggota mempunyai keterikatan kerja dan komitmen bersama; (3) tingkat kepedulian anggota DPRD Kabupaten Magelang terhadap meningkatkan mutu pendidikan adalah tergolong tinggi dengan persentase 56%.

Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) anggota DPRD Kabupaten Magelang sebagai pemangku kebijakan, diharapkan dapat dijadikan masukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan peran yang dimiliki anggota dewan seperti legislasi, anggaran dan pengawasan. Oleh karena itu, Pendidikan perlu ditingkatkan sehingga bisa menghasilkan SDM yang profesional; (2) mahasiswa Administrasi Pendidikan tidak hanya sebagai bahan bacaan yang dapat dijadikan referensi melainkan sebagai bahan tindak lanjut dan kajian matakuliah analisis kebijakan dan pembuatan keputusan, salah satunya di pemerintahan DPRD, sehingga mahasiswa mampu mengembangkan kompetensi yang dimiliki dan dapat diterapkan dalam dunia kerja; (3) anggota partai politik diharapkan agar lebih dapat memberikan sumbangsih kepada DPRD Kabupaten Magelang dalam perumusan kebijakan bidang pendidikan dan terus memperhatikan mutu pendidikan; (4) peneliti lain agar lebih mengembangkan sudut pandangnya dengan pendekatan yang berbeda seperti penelitian di lingkup DPRD Provinsi. Dengan demikian dapat digunakan sebagai

acuan dalam penulisan sejenis dengan menggunakan teknik dan instrumen yang baik dan sempurna.

DAFTAR RUJUKAN

- Bakry, A. 2010. Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, (Online), 2 (1): 2, (http://www.ft-unm.net/medtek/Jurnal_Medtek_Vol.2_No.1_April_2010/Aminuddin%20Bakry.pdf), diakses 20 Februari 2016.
- Kartiwa. 2006. *Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*. (Online), (<http://linkpdf.com/peran-fungsi-dprd>), diakses 22 Februari 2016.
- Rohman, A & Wiyono, T. 2010. *Education Policy in Decentralization Era*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusyanti, H. 2013. *Kebijakan Pendidikan :: Pengertian Kebijakan Pendidikan*, (Online), (<http://www.kajianteor.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian-kebijakan-pendidikan.html>), diakses 13 Desember 2016.
- Subarsono, A.G. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.